

**PERJUANGAN SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI) DALAM  
MENGHADAPI LIBERALISASI PERTANIAN DI SUMATERA  
SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh :  
ASRY LESTARI  
07041281621058**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**Perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam Menghadapi  
Liberalisasi Pertanian di Sumatera Selatan**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**ASRY LESTARI**

**07041281621058**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 November 2020**

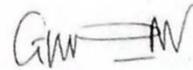
**Pembimbing I**

**Dr. Zulfikri Suleman, MA  
NIP. 195907201985031002**



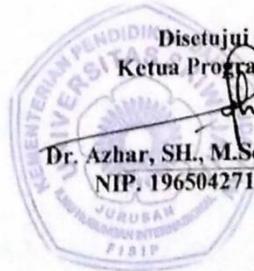
**Pembimbing II**

**Gunawan Lestari Elake., S.IP., MA  
NIP. 198405182018031001**



**Disetujui oleh,  
Ketua Program Studi,**

**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D  
NIP. 196504271989031003**



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

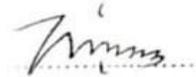
Perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) Dalam Menghadapi  
Liberalisasi Pertanian di Sumatera Selatan

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 21 Desember 2020  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Zulfikri Suleman, MA  
Ketua



Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA  
Anggota



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA  
Anggota



Muchammad Yustian Yusa, SS., M.Si  
Anggota

Indralaya, 2021  
Mengesahkan,  
Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.  
NIP. 196311061990031001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asry Lestari

NIM : 07041281621058

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam Menghadapi Liberalisasi Pertanian di Sumatera Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 25 November 2020

Yang membuat pernyataan



Asry Lestari

07041281621058

## **MOTTO**

Don't be a queen waiting on a king

Be a queen busy with her kingdom until her king arrives

Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah SWT akan memberikan kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah SWT akan menyusahkan dia (HR Abu Dawud No. 3635, At Tirmidzi No. 1940 dan dihasankan oleh Imam At Tirmidzi)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan serta mendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh putrinya

Keluarga besar penulis

Para dosen ilmu hubungan internasional

Para sahabat penulis, dan

Teman – teman di jurusan hubungan internasional

Serta almamater Universitas Sriwijaya

## INTISARI

Berangkat dari sebuah perjanjian pertanian (*Agreement on Agriculture/AoA*) yang merupakan salah satu perjanjian yang telah diatur didalam WTO. Perjanjian ini dibuat atas dasar untuk membuka keran perdagangan bebas mengenai produk – produk hasil pertanian. Isi dalam perjanjian ini mengatur tentang berbagai aturan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk tiap-tiap anggota WTO dan penghapusan batasan – batasan didalam perdagangan khususnya produk-produk pertanian, salah satunya dalam hal subsidi produk-produk pertanian. Permasalahan pertanian di Indonesia akibat perjanjian tersebut mendorong lahirnya sebuah organisasi tani serikat petani Indonesia (SPI) yang memiliki peran serta kegiatan untuk membantu para petani dalam menghadapi masalah pertanian baik ditingkat lokal, nasional maupun global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk – bentuk perjuangan yang dilakukan oleh SPI dalam menghadapi liberalisasi pertanian di Sumatera Selatan khususnya pada desa binaan mereka yaitu desa Bangsal dan desa Talang Keramat. Penulis menggunakan teori Gerakan Sosial dalam penelitian ini dimana dalam teori tersebut terdapat mengenai persiapan yang harus dimiliki dalam kegiatan gerakan sosial ini seperti minat, organisasi, kesempatan, mobilisasi, dan tindakan kolektif sehingga dapat dikatakan hal – hal tersebut merupakan kegiatan advokasi yang berisi mengenai aksi dan kampanye serta dalam kegiatan pemberdayaan yang berisi pendidikan dan pelatihan. Serta dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan – kegiatan advokasi dan pemberdayaan yang dilakukan oleh SPI sebagai salah satu bentuk perjuangan dalam melawan liberalisasi pertanian ini memiliki hasil yang cukup signifikan dikalangan petani. Walaupun, dalam penelitian ini terdapat perbedaan pada hasil diantara kedua desa yang dibina oleh SPI, namun dengan adanya kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh SPI menimbulkan kesadaran pada para petani akibat keresahan dan permasalahan yang ada, sehingga membuat para petani sadar dan berusaha untuk tidak terlalu tergantung serta mandiri untuk produk pertaniannya sendiri khususnya di aspek produksi. Dapat dikatakan bahwa tujuan SPI di Sumatera Selatan masih cukup jauh untuk terlepas dari liberalisasi pertanian apabila tanpa adanya kesadaran tersendiri dari para petani serta bantuan dari pemerintah dan masyarakat luas.

**Kata kunci : Gerakan Sosial, Liberalisasi Pertanian, Serikat Petani Indonesia, Sumatera Selatan**

## ABSTRACT

*Starting from an agricultural agreement (Agreement on Agriculture / AoA) which is one of the agreements that have been regulated in the WTO. This agreement was made on the basis of opening up free trade taps regarding agricultural products. The contents of this agreement regulates the various permissible and unauthorized rules for each member of the WTO and the elimination of restrictions in trade, especially agricultural products, one of which is in terms of subsidies for agricultural products. Agricultural problems in Indonesia as a result of this agreement led to the birth of an Indonesian peasants organization Serikat Petani Indonesia (SPI) which has a role to play in helping farmers in dealing with agricultural problems at local, national and global levels.*

*This study aims to determine how the forms of struggle carried out by SPI in facing agricultural liberalization in South Sumatra, especially in their fostered villages, Bangsal Village and Talang Keramat Village. The author uses the Social Movement theory in this research where in this theory there are preparations that must be had in social movement activities such as interest, organization, opportunities, mobilization, and collective action so that it can be said that these are advocacy activities that contain action and campaigns and in empowerment activities containing education and training. And in this study using qualitative methods that are descriptive.*

*The results showed that the advocacy and empowerment activities carried out by SPI as a form of struggle against agricultural liberalization had significant results among farmers. Although, in this study there were differences in the results between the two villages fostered by SPI, the activities carried out by SPI raised awareness among farmers due to the existing anxiety and problems, thus making farmers aware and trying not to be too dependent. and independent for its own agricultural products, especially in the production aspect. It can be said that the objectives of SPI in South Sumatra are still far enough away from agricultural liberalization if there is no awareness of the farmers as well as assistance from the government and the wider community.*

**Keywords:** *Social Movement, Agricultural Liberalization, Serikat Petani Indonesia, South Sumatra*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat berkah, rahmat dan hidayahnya serta kesehatan jasmani dan rohani yang dilimpahkan oleh-Nya lah penulisan skripsi yang berjudul “PERJUANGAN SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI) DALAM MENGHADAPI LIBERALISASI PERTANIAN DI SUMATERA SELATAN” dapat diselesaikan setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang dan berliku.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana organisasi petani (SPI) dalam menghadapi liberalisasi pertanian khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Selain itu juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sidang Strata 1 (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam pembuatan penulisan skripsi dari awal hingga akhir banyak melibatkan berbagai pihak yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati saya sampaikan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memimpin jalannya perkuliahan di FISIP Unsri.
2. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya yang telah mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku pembimbing I atas waktu bimbingan, arahan, ilmu dan pemberian solusinya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA selaku pembimbing II atas waktu bimbingan, ilmu, semangat serta arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A yang telah bersedia menjadi penguji dari penelitian ini serta memberikan ilmunya selama berkuliah di FISIP Unsri.
6. Bapak Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si yang telah bersedia menjadi penguji dari penelitian ini serta mengajarkan banyak hal selama saya kuliah.

7. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama saya kuliah dan menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah berperan bagi saya dalam belajar baik di dalam maupun di luar kelas.
9. Kak Dimas dan mba Sisca sebagai staff yang selalu dan sabar membantu penulis dalam proses administrasi dan lainnya selama perkuliahan
10. Para informan yang telah bekerjasama memberikan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
11. Kedua orang tuaku, Iwan Ridwan dan Nyimas Dewi Rahmawati. Teruntuk papa dan mama, kalian adalah alasan utama dan terpenting dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih selalu ada, memberi support baik secara moril maupun, semoga Allah senantiasa selalu melindungi serta memberikan kesehatan pada kalian.
12. Kepada teman – teman metal tapi dangdut Teknik HI, Dian partner tidak poenyaku, Mayang partner gelutku, Syifa Princess layo, Eby our true lop dan kedua anak bundo Della dan Fajri *thank you for always here for the first semester till the end*. Terimakasih untuk mubes, diskusi, ghibah bahkan obrolan receh selama kuliah. See you para proletar yang selangkah lagi menuju borjuis!
13. Teruntuk Desniari sahabat penulis yang terhalang jarak Jogja – Palembang, terimakasih untuk selalu ada mendengarkan segala keluh kesah hingga senang penulis selama pengerjaan skripsi ini.
14. Teruntuk Sifa, Clara dan Kiki salah satu sahabat yang terhalang jarak (lagi) Balaraja – Palembang, terimakasih untuk selalu menyediakan kuping dan kuotanya untuk mendengarkan segala keluh kesah hingga senang penulis selama pengerjaan skripsi ini.
15. Kepada para Kamerad kesayanganku Alda Jodohnya Mark Lee dan Iqbal cowo (yang katanya) ganteng, terimakasih atas deep talk, ghibah dan segala obrolan ngawur walaupun kadang berbobot. Semoga segala harapan kita segera dikabulkan sama Allah ya!

16. Terimakasih untuk Irma dan Naura yang selalu menjadi teman yang baik selama perkuliahan ini, semoga hal – hal baik selalu melingkupi kalian!
17. Untuk bus Pria Idaman yang selalu sedia mengantar jemput penulis selama kuliah dari Perumnas – Indralaya dan para penghuninya, terimakasih! Saya kira hanya akan menjadi penumpang saja di bis ini gataunya jadi keluarga juga, *so happy to know you all.*
18. Teruntuk SPI Sumsel dan WALHI Sumsel yang banyak memberikan informasi, ilmu baru dan membantu penulis selama pengerjaan skripsi ini.
19. Seluruh teman – teman Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2016, yang turut memberi andil dan mewarnai masa kuliah penulis semenjak pertama masuk kuliah hingga akhir, yang tidak dapat diucapkan satu – satu semoga Allah senantiasa mengiringi langkah yang kita tempuh untuk masa depan yang lebih baik lagi.
20. *Last but not least* untuk diri sendiri yang telah berhasil menghadapi dan melewati drama perskripsian ini.

Saya menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, Desember 2020

Asry Lestari

NIM. 07041281621058

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.5.2 Manfaat Praktis.....	13
1.6 Kajian Pustaka.....	13
1.7 Landasan Konseptual.....	19
1.7.1 Kerangka Konsep.....	19
1.7.2 Alur Pemikiran.....	30
1.8 Argumen Utama.....	31
1.9 Metode Penelitian.....	32
1.9.1 Jenis Penelitian.....	32
1.9.2 Definisi Konsep.....	33
1.9.3 Fokus Penelitian.....	33

1.9.4 Unit Analisis Data.....	35
1.9.5 Jenis dan Sumber Data.....	35
1.9.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
1.9.7 Teknik Penentuan Informan.....	36
1.9.8 Teknik Keabsahan Data.....	36
1.9.9 Teknik Analisa Data.....	37
1.9.10 Jadwal Penelitian.....	38
1.9.11 Sistematika Penulisan.....	39
<b>BAB 2 Gambaran Umum.....</b>	<b>40</b>
2.1 Agreement of Agriculture.....	40
2.2 Serikat Petani Indonesia.....	50
2.3 Liberalisasi Pertanian di Indonesia.....	56
2.4 Dampak Liberalisasi Pertanian di Sumatera Selatan.....	70
<b>BAB 3 Pembahasan dan Isi.....</b>	<b>76</b>
Perjuangan SPI dalam Menghadapi Liberalisasi Pertanian di Sumatera Selatan.....	76
a) Advokasi.....	79
b) Pendidikan.....	86
c) Pelatihan.....	99
<b>BAB 4 Penutup.....</b>	<b>106</b>
Kesimpulan.....	106
Saran.....	111
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>112</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>118</b>

## Daftar Tabel

1.1. Tabel Kajian Pustaka.....	13
1.2. Tabel Fokus Penelitian.....	33
1.3. Tabel Jadwal Penelitian.....	38
1.4. Tabel Kotak Agreement of Agriculture.....	43
1.5. Tabel Indikator Pertanian Berkelanjutan.....	87

## Daftar Singkatan

AMS	: Agreement Measure of Support
AoA	: Agreement on Agriculture
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPMD	: Badan Pendidikan Masyarakat Desa
BPMT	: Badan Perusahaan Bahan Makanan dan Pembuka Tanah
BUUD	: Badan Usaha Unit Desa
DDA	: Doha Development Agenda
DS	: Domestic Support
DPP	: Dewan Pengurus Pusat
DPW	: Dewan Pengurus Wilayah
FSPI	: Federasi Serikat Petani Indonesia
GATT	: General Agreement Tariffs and Trade
GATS	: General Agreement on Trade in Service
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKTI	: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
HPP	: Harga Pembelian Pemerintah
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IMF	: International Monetary Fund
JOKOWI	: Joko Widodo
KTM	: Konfrensi Tingkat Menteri
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LVC	: La Via Campesina
MNP	: Majelis Nasional Petani

MP3EI : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

ORNOP : Organisasi Non Pemerintah

PUSDIKLAT : Pusat Pendidikan dan Pelatihan

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

RPPK : Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

SDA : Sumber Daya Alam

SDM : Sumber Daya Manusia

SPI : Serikat Petani Indonesia

SPSS : Serikat Petani Sumatera Selatan

SUMSEL : Sumatera Selatan

UUPA : Undang – undang Pokok Agraria

UUPBH : Undangn – undang Perjanjian Bagi Hasil

WTO : World Trade Organization

# BAB 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Banyaknya kejadian yang telah terjadi dalam dunia global pasca berakhirnya perang dingin memberikan perubahan isu kajian yang ada di dunia ini. Perubahan isu kajian yang terjadi akibat adanya perang ideologi tersebut memberikan dampak pada adanya pergeseran ideologi dunia yang awalnya realis menjadi liberalis dimana muncul keyakinan bahwa negara akan lebih baik menjadi kooperatif daripada konfliktual. Adanya kesadaran akan kesamaan kepentingan dalam banyak hal seperti ekonomi, politik dan sebagainya sehingga kemudian terbentuklah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengurangi dan meminimalisir konflik yang terjadi dan akan terjadi di antara negara-negara di dunia.

Salah satu perubahan isu yang sangat berpengaruh pada tatanan dunia global sekarang ialah isu ekonomi. Akibat dampak kerugian di berbagai sektor yang terjadi akibat perang maka negara – negara mulai memikirkan bagaimana caranya mengembalikan keadaan negara menjadi lebih baik lagi. Dalam isu ekonomi terdapat kegiatan yang sering dilakukan yaitu perdagangan, semenjak berakhirnya perang negara – negara di dunia mulai berkerjasama melalui perdagangan bebas yang dilakukan antar negara. Dalam perdagangan bebas terdapat beberapa peraturan dan juga perjanjian yang telah disepakati untuk kegiatan perdagangan bebas, agar kegiatan perdagangan bebas ini berjalan lancar maka dibuatlah sebuah perjanjian perdagangan bebas dunia yaitu *General Agreement Tariffs and Trade (GATT)*.

Salah satu aturan dan perjanjian dalam perdagangan bebas dunia ialah *General Agreement Tariffs and Trade (GATT)*, pembentukan GATT pada tahun 1947 yang didasari oleh adanya dorongan dari perdagangan internasional sehingga menghilangkan hambatan tariff dan non tariff, namun perjalanan GATT tidak begitu mulus, sehingga pada Doha round GATT

berubah nama menjadi *World Trade Organization* (WTO) yang secara resmi telah terbentuk pada 1 Januari 1995. Cakupan pembahasan dalam WTO tidak hanya membahas tentang perdagangan barang saja (GATT), melainkan perdagangan jasa (GATS), investasi (TRIMs) dan kekayaan intelektual (TRIPs). Selain pengaturan-pengaturan tersebut, dalam putaran Doha WTO menyepakati adanya agenda pembangunan Doha (*Doha Development Agenda-DDA*) yang didalamnya terdiri atas beberapa perjanjian seperti perjanjian mengenai pertanian, perjanjian di bidang jasa, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), Perjanjian dalam Akses Pasar untuk produk non-pertanian (NAMA), Perjanjian pada *Trade Facilitation* (Fasilitasi perdagangan), dan beberapa perjanjian yang mengatur tentang paket perberlakuan berbeda untuk negara-negara berkembang dan terbelakang / *Least Developed Countries*(LDCs).

Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agriculture/AoA*) merupakan salah satu perjanjian yang telah diatur didalam WTO. Perjanjian ini dibuat atas dasar yakni untuk membuka keran perdagangan bebas mengenai produk – produk hasil pertanian. Isi dalam perjanjian ini mengatur tentang berbagai aturan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk tiap-tiap anggota WTO dan penghapusan batasan - batasan didalam perdagangan khususnya produk-produk pertanian, salah satunya dalam hal subsidi produk-produk pertanian.

Dalam perjalanan terbentuknya perjanjian – perjanjian ini memberikan banyak reaksi yang beragam dari berbagai kalangan dan juga dampak yang dihasilkan dari perjanjian tersebut. Salah satu contoh reaksi terhadap kebijakan – kebijakan WTO adalah matinya seorang petani dan juga mantan ketua dari Federasi Petani di Korea Selatan bernama Lee Kyung Hae, yang berumur 56 tahun di Cancun, Meksiko saat acara pembukaan Konferensi Tingkat Mentri WTO pada 10 September 2003. Pada saat itu Lee menusukkan dirinya pada barikade baja tajam yang dipasang oleh pasukan keamanan untuk menegah masuknya para pengunjuk rasa ke dalam ruang sidang resmi. Sebelumnya, Lee pernah melakukan aksi selama berminggu – minggu

didepan gedung markas besar WTO di Jenewa, Swiss. Ia membagikan pamlet berisi tentang nasib buruk yang menimpa petani dan masyarakat pedesaan akibat peraturan WTO di bidang pertanian (Hira, 2005).

Selain aksi – aksi yang terjadi akibat hadirnya kebijakan – kebijakan WTO yang menyusahkan kalangan petani adapula dampak yang didapatkan petani akibat adanya perjanjian – perjanjian WTO. Ada juga dampak yang ditimbulkan dari kebijakan – kebijakan dari WTO ialah (Saragih, 2015) : (1) Akibat terjadinya liberalisasi dan privatisasi mengakibatkan beberapa negara harus melakukan impor seperti Meksiko yang makanan pokok serta sebutan negara sebagai asal – usul jagung harus mengimpor jagung dari USA, tidak berbeda dengan Filipina yang juga merupakan pusat penelitian padi harus menjadi negara pengimpor beras, (2) Persaingan produkpun menjadi kendala untuk India dimana para petaninya sanggup memproduksi minyak goreng dengan bahan yang sangat bagus, namun para petani India disana tidak sanggup untuk bersaing dengan produk yang berasal dari CPO dari negara lain seperti Indonesia dan Malaysia, (3) Persaingan mengenai imporpun terjadi di Indonesia yang tidak sanggup bersaing dengan produk impor seperti kedelai dari USA dan Amerika Latin, gula dari India dan sapi serta susu dari New Zealand dan Australia. Terjadinya impor sebanyak lebih dari 7 juta ton setiap tahunnya untuk gandum / terigu membuat makanan berkarbohidrat lainnya yang berasal dari Indonesia menjadi terpinggirkan, (4) Terjadinya perubahan fokus utama dari sektor pertanian pada sektor elektronik dan otomotif serta produksi industri lainnya membuat negara Jepang dan Korea harus melakukan impor sekitar 70% untuk kebutuhan pangannya dan membuat para petani menjadi frustrasi dan mengalami penurunan mengenai jumlah petani di negara tersebut, Dan (5) kebijakan pertanian yang ada di Eropa pun mengalami perubahan padahal sebelumnya kebijakan tersebut telah permanen dalam melindungi petani. Banyaknya protes yang dilakukan oleh para petani Eropa karena contoh

semisal harga dari 1 liter susu produksi para petani menjadi lebih murah dari harga 1 liter air mineral.

Setelah Arab Spring yang menambahkan disintegrasi sosial dan politik yang terkait dengan 3 krisis (perubahan iklim, pangan dan peak oil) dan pemicu terjadinya arab spring sendiri adalah dikarenakan seorang pemuda yang tidak dapat menjual sayuran tanpa adanya lisensi di Tunisia dan tingginya harga pangan. Lalu krisis yang terjadi di Suriah berawal dari kekeringan, di Mesir krisis sendiri terjadi akibat kenaikan harga pangan dan di Irak yang terjadi adalah perang dan control sumber daya serta minyak. Selain karena minyak, diloluskannya iraqi order 81 oleh Paul Bremer bagi GMO milik korporasi benih dan adanya perubahan rezim yang mengakibatkan hancurnya Iraq, Iraqi order memaksa para petani untuk membeli benih dan penggunaan benih lokal dianggap melanggar hukum sedangkan Iraq sendiri adalah rumah budaya pertanian semenjak masa mesopotamia. Lalu bagaimana rezim pertanian dan perdagangan dapat berkaitan dengan perang, ini dikarenakan bahan kimia yang digunakan dalam pertanian berakar pada perang (Kompas, 12 Oktober 2014).

Pabrik pupuk dikembangkan dari pabrik bahan peledak yang telah kehilangan pasar setelah perang berakhir, lalu pestisida yang awalnya digunakan sebagai gas saraf di kamp konsentrasi (dikenal sebagai Zyklon B, pestisida berbasis sianida) dan Agent orange (dioksida) yang dipakai dalam perang Vietnam menjadi herbisida. Didalam perang memiliki sifat untuk membunuh sama halnya dengan pertanian yang menggunakan bahan – bahan kimia yang dapat membunuh serangga, kupu – kupu, jasad renik dan lain – lain. Sekitar 75% penyerbuk alami musnah dan semua racun yang masuk ketubuh dapat membunuh manusia dengan berbagai penyakit seperti kanker dan semakin banyak kasus autisme pada anak dan Alzheimer pada orang lanjut usia. GMO yang konon tahan akan serangga, penyakit, pestisida buatan dan memberi sumbangan besar pada dunia sebenarnya merusak jaringan alamiah kehidupan,

mengancam keragaman hayati lingkungan dan membahayakan kesehatan (Kompas, 12 Oktober 2014).

Beberapa dampak yang telah terjadi diberbagai negara lain tidak membuat Indonesia untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota WTO, Indonesia dalam menerapkan komitmen pada organisasi ini dengan cara melakukan liberalisasi dan reformasi pada bidang pertanian. Pada tahun 1998 pasca terjadinya krisis, pemerintah mengambil pilihan yang besar dan radikal dalam reformasi pertanian sesuai dengan peraturan IMF. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan adalah : (1) Terjadinya pengurangan pada monopoli impor BULOG untuk gula, kedelai, tepung, tepung gandum, bawang putih dan beras, (2) Penghapusan pada angka tarif maksimal 5% untuk semua makan dan peraturan mengenai muatan lokal, (3) Penghapusan tata perdagangan dan pemasaran restriktif untuk beberapa komoditi termasuk persyaratan muatan lokal, dan (4) mengatur perdagangan untuk produk pertanian antar wilayah yang meliputi jeruk, cengkeh dan ternak. Melalui ini diharapkan dalam pelaksanaan yang konsisten dapat memperbaiki kepercayaan dari para investor dan meningkatkan investasi yang lebih produkti dan efisien ( Erwidodo dan Hadi Utomo Prajogo, dikutip dari Yuniarti, 2015). Dan juga dalam melakukan komitmen terhadap WTO telah menggerakan inisiatif pada liberalisasi perdagangan melalui perluasan akses pasar, pengurangan hambatan perdagangan tarif dan non-tarif termasuk didalamnya subsidi. Khusus pada sektor pertanian untuk liberalisasi perdagangan yang berada di bawah *Uruguay Round* yaitu *Agreement of Agriculture* (AoA), yang pada dasarnya AoA memiliki tujuan untuk menyerasikan kebijakan perdagangan nasional dengan peraturan internasional untuk memberi dorongan kuat dalam pertumbuhan di sektor pertanian.

Pada sektor pertanian, Indonesia telah mengikat seluruh mata tarif pada komoditas pertanian baik melalui proses tarifikasi maupun melalui *ceiling binding* yang sejalan dengan peraturan dalam *final act* dan *modalities for the establishment of specific binding commitments*

*under the reform programme*. Serta Indonesia mengikuti peraturan WTO mengenai akses pasar (*Market Access*) dan telah melaksanakan *domestic support* (DS) walaupun dalam pelaksanaan *domestic support* sektor pertanian di Indonesia relatif kecil dan berada dibawah batas dari *de minimis* yang diperbolehkan oleh WTO karena selama ini berada dibawah 10%. Untuk bidang ekspor Indonesia melakukan komitmen dalam pengurangan subsidi ekspor untuk produk beras baik dalam nilai maupun jumlah yang berdasarkan peraturan WTO, dan dalam perhitungan subsidi ekspor digunakan dalam tahun 1986 – 1990. Selain itu Indonesia memberikan komitmen pada bidang – bidang yang berkaitan langsung dengan pertanian seperti pada aspek kelembagaan, hal ini dilakukan dengan membahas fungsi dan peran pemerintah dalam perdagangan internasional melalui bulog. (Khudori, 2004)

Indonesia pun dalam sektor pertanian melakukan beberapa perubahan dalam undang – undang No 6 tahun 1989 mengenai paten berubah kedalam UU No 13 tahun 1997. Dalam perubahannya yang amat substansial yaitu mencakup hak paten atas makhluk hidup. Revisi UU No. 13 tahun 1997 menjadi UU No 14 tahun 2000 dimana perubahan terjadi pada pasal 7 (d) dan (e) yang mengecualikan paten makhluk hidup kecuali jasad renik (Khudori, 2004).

Sebagai salah satu negara agraris Indonesia menimbulkan banyak polemik akibat dari adanya kebijakan – kebijakan yang telah diratifikasi oleh pemerintah nasional seperti halnya permasalahan paten benih ini, sangat disayangkan apabila para petani akan terkena masalah hukum perihal benih yang telah dipatenkan dan bukan hal yang mustahil untuk terjadi dikarenakan ada beberapa kasus yang telah terjadi perihal benih ini seperti di India, padi Basmati telah dipatenkan oleh perusahaan amerika dan juga padi Jasmine dari Thailand. Renee Valve dari GRAIN sempat melacak benih padi lokal Indonesia di perpustakaan nasional AS dan menemukan 275 jenis benih dengan nama – nama lokal Indonesia seperti Gogo Lempuk, Kawoeng, Bengawan, Peta, Gropak Godeh, Tjina, Sigadis, Dewi Tara, Gundul, Gendjah

Lampung, Java Long Grain, Rodjolele, Pulut Manjetti, dan lainnya(Wahono, 1999). Maka tidak mungkin bisa saja bibit – bibit tersebut telah di patenkan.

Indonesia yang merupakan negara agraris memiliki banyak daerah yang memiliki lahan dibidang sektor pertanian dan salah satunya ialah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah yang tergabung dalam mega project pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang termasuk didalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan memiliki semboyan “Lumbung Pangan, Lumbung Energi”.

Sumatera Selatan yang dipilih menjadi salah satu lumbung pangan diakarenakan mulai sempitnya area lahan pertanian di pulau jawa dan juga banyaknya kebutuhan pangan domestik yang mendorong pemenuhan dari produksi di luar pulau jawa selain mengandalkan impor yang harganya cukup mahal. Oleh karena itu karena adanya surplus yang terjadi di Sumatera Selatan dapat ditingkatkan lagi untuk dapat berkontribusi secara nyata terhadap kebutuhan pangan nasional. Dalam pengertiannya untuk program Sumatera Selatan yang menjadi lumbung pangan dapat diartikan menjadi susunan aktivitas terpadu pada bidang pertanian seperti tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan yang termasuk didalamnya agroindustry dan pemasaran dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor – impor pada sektor pertanian, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menanggulangi atau menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mempercepat revitalisasi pada pedesaan dan menguatkan ketahanan pangan bagi masyarakat Sumatera Selatan (Sriwijaya., 2005).

Setelah masa berakhirnya kepemimpinan SBY, presiden SBY meminta kepada pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan proyek MP3EI tersebut. Menanggapi permintaan

tersebut Jokowi yang merupakan presiden setelah masa pemerintah SBY memberikan pernyataan bahwa siap melanjutkan proyek tersebut hingga 11 tahun kedepan. Proyek yang telah diluncurkan semenjak 3 tahun lalu ini telah menjalankan 382 proyek dengan rincian, 208 proyek pembangunan infrastruktur dan 174 proyek pada sektor riil. Dan ditegaskan kembali oleh Jokowi bahwa saat dirinya sudah secara resmi dilantik menjadi presiden RI ke-7 pada oktober mendatang. Dan akan dilakukan peninjauan kembali terhadap proyek ini dalam bentuk evaluasi, sudah sampai sejauh mana proyek MP3EI ini telah membantu percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Tambun, 2020).

Sehubungan dengan pergantian pemimpin dan juga arah kebijakan kelanjutan dari MP3EI ini memiliki tujuan yang berbeda antara MP3EI dan pandangan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintahan dibawah kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla. Dalam hal ini memiliki orientasi yang berbeda, pada pemerintahan Jokowi memiliki orientasi ke pertanian, kedaulatan pangan dan seluruh infrastruktur. Dalam mencapai kedaulatan pangan, pemerintah akan melaksanakan beberapa kebijakan seperti pembuatan lahan – lahan pertanian baru, membuat sistem irigasi, subsidi pupuk dan sebagainya. Untuk sumber pendanaan, pada pemerintahan Jokowi akan melakukan pembangunan pemerintahannya dengan versi yang lebih fleksibel dan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan pada APBN namun juga pada investasi. (Kompas, 2020). Mega Project MP3EI pada masa SBY akan tetap dijalankan pada masa pemerintahan Jokowi namun akan diubah mengikuti pada visi – misi yang tertuang dalam bentuk nawacita yang menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu dengan mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional dan yang lebih terpenting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan. Namun, pada masa pemerintahan Jokowi lebih menekankan kepada investasi dimana ini ialah salah satu bentuk dari adanya liberalisasi perdagangan, dimana dengan terbukanya gerbang investasi maka akan

mempengaruhi apa yang akan terjadi di pasar domestik dan juga kepada para petani yang akan berhadapan langsung dengan pasar global.

Dengan arah kebijakan yang ada, permasalahan – permasalahan petani di Indonesia masih tetap berlanjut khususnya di daerah Sumatera Selatan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh para petani di Sumatera Selatan ialah seperti akses kepada input produksi (benih, pupuk, pestisida), apabila akses untuk para petani mendapatkan produk – produk unggul menyulitkan para petani dimasa panen mendatang seperti telat masa panen atau bahkan gagal panen yang akan merugikan di pihak petani. Sebenarnya Sumatera Selatan memiliki benih lokal seperti dayang rindu, semester, seputih, sekuning, ketumbar, serengit dan lain – lain yang jumlahnya puluhan namun benih – benih lokal ini jarang diminati karena usia panennya yang lama serta benih lokal digunakan oleh para petani yang tidak mendapatkan akses untuk memperoleh benih unggul (Kompas, Varietas Padi Lokal Sumsel Tidak Diminati, 2020). Permasalahan akses ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan para petani meskipun Sumatera Selatan memiliki benih – benih lokal namun dengan perbedaan masa panen yang cukup lama menimbulkan polemik penggunaan bibit lokal dengan bibit unggul.

Dengan adanya polemik perihal bibit serta untuk menghindari permasalahan panen dan hasil yang tidak sesuai membuat para petani di Sumatera Selatan bergantung pada bahan produksi dari perusahaan – perusahaan multinasional agribisnis. Ketidak meratanya akses yang diterima perihal bahan produksi pun mempengaruhi para petani Sumatera Selatan dalam mendapatkan akses bahan produksi yang unggul sehingga dapat mempengaruhi hasil panen dan tidak dapat bersaing dengan produk pertanian luar. Serta dengan adanya liberalisasi pun membuat produk – produk pertanian lokal harus bersaing dengan produk luar serta banyaknya persyaratan membuat para petani tradisional yang kurang mendapatkan akses Pendidikan dan akses bahan produksi yang unggul hanya dapat merambah pasar tradisional saja itupun pasar

tradisional sudah banyak produk – produk luar sehingga persaingan harga dan mutu barang pun dapat membuat rugi para petani tradisional.

SPI sebagai organisasi massa memiliki peran penting seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan hadir untuk menyediakan keperluan – keperluan dan membantu penyelesaian masalah yang terjadi pada petani. LSM yang merupakan suatu gerakan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan melalui aksi peningkatan kemampuan kelembagaan, kemandirian dan produktivitas pada kelompok – kelompok masyarakat yang termasuk didalamnya ditanamkan kesadaran masyarakat untuk membentuk kemandirian, partisipasi dan keswadayaan. Begitupun dengan aksi pemberdayaan yang dilakukan oleh SPI untuk menciptakan partisipasi dan kemandirian yang telah menjadi anggota SPI. Pemberdayaan yang dilakukan oleh SPI pun sesuai dengan visi SPI mengenai kedaulatan pangan Indonesia yang terdiri dari : pembangunan perdesaan, kedaulatan pangan, kedaulatan petani atas benih, pembaruan agrarian sejati, penguatan organisasi tani, akses modal, jaminan sosial untuk petani dan jaminan pasar bagi petani.

Program – program yang dilakukan oleh SPI merupakan program yang dibutuhkan oleh para petani, adapun beberapa program yang dilakukan seperti melakukan beragam bentuk kegiatan Pendidikan atau kaderisasi untuk anggota, mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan dan berguna untuk petani dan anggota, memobilisasi massa aksi untuk melakukan aksi massa yang menjadi salah satu kekuatan utama SPI, mengajak dan mendukung untuk lahirnya organisasi rakyat lainnya yang memiliki arah yang sama dengan SPI dan memiliki hubungan yang setara dengan lembaga serta aparatur negara yang kritis baik dalam maupun luar negeri selama tidak bertentangan dengan tujuan, pandangan dan kepentingan serta pendekatan yang dilakukan oleh SPI. Program yang dilakukan SPI berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki program lebih pro kepada pasar. SPI juga memiliki isu utama seperti kedaulatan pangan, hak asasi petani, koperasi,

pertanian agroekologis, reforma agrarian dan anti neoliberalisme. Adapun SPI yang memiliki sifat unitarian yaitu kebijakan pusat berlaku juga untuk SPI yang berada di daerah manapun termasuk Sumatera Selatan membuat segala kebijakan dan program akan mengikuti apa yang telah ada dipusat dan diturunkan ke daerah. Maka kebijakan yang telah disepakati bersama akan dianut dan diadopsi oleh anggota yang berada di daerah – daerah seperti Sumatera Selatan.

Maka berangkat dari permasalahan – permasalahan yang timbul akibat adanya liberalisasi pertanian ini serta ketimpangan kebijakan pemerintah penulis mencoba untuk melihat bagaimana gerakan sosial petani (SPI) dalam memperjuangkan hak – hak petani untuk masa depan pertanian yang lebih baik. Dan beberapa penjelasan diatas menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut kegiatan – kegiatan LSM dalam menghadapi keadaan ini, bahwa kebijakan dari suatu organisasi internasional berdampak kepada suatu negara dan daerah bahkan dapat mengancam aspek lainnya tidak hanya dalam aspek ekonomi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang diatas, peneliti dapat menarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana Perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam menghadapi liberalisasi Pertanian di Sumatera Selatan?”

## 1.3 Batasan Masalah

Dari pemaparan rumusan masalah diatas, peneliti mengambil batasan dalam penelitian ini. Dalam kasus ini penulis hanya meneliti aspek yang banyak di Sumatera Selatan ini seperti permasalahan diinput produksi (bibit, pupuk dan pestisida) dan dilakukan di 2 wilayah di Sumatera Selatan seperti Ogan Komering Ilir di desa Bangsal dan Banyuasin di Kelurahan Talang Keramat.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para petani Indonesia khususnya yang berada di Sumatera Selatan dalam memperjuangkan hak dan juga dapat mewujudkan kemandirian petani dari kebijakan yang dirasakan hanya berpihak pada para pemilik modal saja. Dari adanya penelitian ini juga diharapkan dapat sesuai dan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi semua untuk mengkaji gerakan sosial dan Non – Governmental Organizations yang telah menjadi ciri khas dalam gerakan sosial seperti Serikat Petani Indonesia dalam menyuarakan dan juga mempengaruhi kebijakan global akibat kurang baiknya tatanan sosial saat ini.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak tertentu untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan di bidang ilmu Hubungan Internasional, yaitu pada organisasi perdagangan yang memiliki dampak terhadap kebijakan yang ada di suatu negara.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah dalam mengkaji kebijakan terutama di bidang pertanian yang akan mempengaruhi kesejahteraan petani. Serta diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi tambahan bagi pengkaji hubungan internasional, terutama untuk yang tertarik mengenai kajian peranan organisasi internasional dalam penanganan isu global. Serta penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi ilmu hubungan internasional mengenai kegiatan dan peran Serikat Petani Indonesia dalam menghadapi liberalisasi pertanian terutama yang berada di daerah Sumatera Selatan.

## 1.6 Kajian Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini maka sangat diperlukan adanya kajian pustaka dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti oleh peneliti, adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut;

**Tabel 1.1 Kajian Pustaka**

1	Nama	Adi Joko Purwanto
	Judul	PERJUANGAN KELOMPOK TANI INTERNASIONAL DALAM MELAWAN PROGRAM LIBERALISASI PERTANIAN GLOBAL (Studi tentang perlawanan La Via Campesina terhadap program liberalisme pertanian WTO)
	Tahun	2012
	Hasil Penelitian	Penelitian ini mengungkapkan bahwa bagi La Via Campesina yang merupakan gerakan neo-liberalisme yang memiliki tujuan untuk memajukan serta memakmurkan masyarakat dunia melalui lembaga – lembaga internasional seperti WTO yang ternyata mendapatkan berbagai perlawanan dari sebagian masyarakat internasional. Terjadinya pro kontra terhadap isu liberalisme membawa sebagian kelompok yang kontra menganggap ini hanya menguntungkan beberapa kelompok saja terutama yang memiliki modal yang besar atau mengenai negara – negara maju dengan

		<p>negara – negara berkembang, negara berkembang selain dieksploitasi juga harus patuh pada peraturan internasional yang hanya menguntungkan negara maju saja. Maka disinilah La Via Campesina akan memperjuangkan beberapa nilai yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat sipil global yang membawa kesimpulan bahwa sedang terjadi proses institusionalisasi oleh aktor yang bukan negara.</p>
	Perbandingan	<p>Perbandingan terletak pada objek yang akan diteliti bahwa dalam penelitian ini berfokus pada gerakan La Via Campesina sedangkan penulis akan meneliti mengenai Serikat Petani Indonesia (SPI) yang berada di Sumatera Selatan.</p>
2	Nama	Aswin Baharuddin
	Judul	Resistensi Koalisi Organisasi Non-Pemerintah untuk Keamanan Pangan dan Hayati terhadap Program Penanaman Benih Transgenik Monsanto di Indonesia
	Tahun	2015
	Hasil Penelitian	<p>Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya pro kontra mengenai program penanaman benih transgenik di Sulawesi Selatan, dimana dalam hal ini Monsanto sebagai pendukung dan koalisi LSM untuk keamanan pangan dan hayati sebagai penentang. Masing – masing melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan para petani dan publik melalui wacana yang pada awalnya</p>

	<p>program ini akan tetap dilaksanakan walaupun terjadi penolakan dari berbagai pihak seperti LSM dan para ilmuwan dikarenakan Monsanto dan kementrian pertanian dapat membuat para petani dan publik mau menerima karena tujuan dari adanya program ini ialah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.</p> <p>Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa solidaritas dalam kelompok dapat terbentuk dan terjaga dalam jangka waktu yang lama karena adanya sebuah identitas kolektif sebagai pihak yang mengartikulasikan kepentingan para petani dan lingkungan hidup. Identitas kolektif ini terbentuk dari visi serta pengalaman aksi dari pihak – pihak yang memiliki kesamaan terhadap isu – isu seputar lingkungan hidup, dan dari identitas kolektif itulah yang membentuk koalisi LSM menjadi lebih mudah untuk mengkoordinasi dukungan dari para ilmuwan dan jaringan internasional lainnya. Pada akhirnya program yang menimbulkan banyak pro – kontra ini dihentikan pada Desember 2003 setelah hasil panen dari benih transgenik di Sulawesi Selatan rendah dan tidak merata, akibatnya terjadinya perubahan pandangan dari para petani yang awalnya memberikan dukungan menjadi sebaliknya. Dari kegagalan program ini memenuhi janji yang terkait mengenai kesejahteraan</p>
--	---

		petani dan komitmen terhadap isu – isu pelestarian lingkungan inilah yang menggabungkan gelombang penolakan yang digalang oleh koalisi LSM ini menjadi semakin besar dan kuat. Dengan adanya perubahan sikap petani dan semakin besar serta kuatnya koalisi inilah yang akhirnya membuat pemerintah untuk menghentikan program tersebut.
	Perbandingan	Perbandingannya terletak pada tempat yang dijadikan penelitian oleh peneliti sekarang, apabila dalam penelitian yang dilakukan disini dilakukan di Sulawesi Selatan sedangkan tempat yang dilakukan oleh peneliti di Sumatera Selatan dan juga pelaku didalam peneliti terdahulu tergabung dalam koalisi yang berisi beberapa organisasi sedangkan pelaku yang akan diteliti hanya terdapat satu organisasi.
3	Nama	Ahmad Izzudin
	Judul	Gerakan Sosial Petani : Pola, Strategi dan Tantangan di Tengah Modernitas.
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Dalam buku ini mengungkapkan bahwa terjadi beberapa perubahan yang terjadi di Yogyakarta dimana masyarakat selalu mengalami perubahan disetiap tingkat kompleksitas yang dihadapi internal petani. Pada tingkat makro, yang melandasi adanya perubahan terjadi akibat langsung adanya sistem ekonomi, politik, dan kultur

		<p>yang dapat merugikan nasib hidup petani. Pada tingkat mezzo, terjadinya perubahan akibat adanya pergeseran paradigma idealitas kelompok, komunitas dan organisasi. Dan pada tingkat mikro, perubahan terjadi karena adanya interaksi dan perilaku individual petani yang saling berkaitan.</p> <p>Dari tiga level perubahan diatas, maka beberapa aktivis melakukan terus berupaya melakukan pola – pola adapun upaya – upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sebuah pengorganisasian komunitas petani agar dapat melakukan perubahan mereka secara mandiri; peningkatan kesadaran, pentingnya merebut hak asasi petani, mendorong perubahan kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap petani, pengembangan lokal dan peningkatan ekonomi. Pola gerakan untuk perubahan tersebut diakomodir dengan cara mobilitas pengorganisir petani, gerakan epistemic melawan kegamangan intervensi negara, gerakan grassroots untuk pemberdayaan, gerakan kesadaran kritis dealektis, membangun gerakan organic dari akar rumput dan gerakan siklus fermentasi.</p>
	Perbandingan	Perbandingan terletak pada tempat yang akan dilakukan penelitian ini, bahwa dalam buku ini peneliti sebelumnya melakuakannya di Yogyakarta sedangkan peneliti akan melakukan di Sumatera Selatan dan dalam aspek yang

		akan diteliti. Dalam buku ini terlihat sangat umum sedangkan peneliti akan fokus pada aspek bibit dan pupuk organik.
--	--	--

Sumber : diolah oleh penulis

## 1.7 Landasan Konseptual

### 1.7.1 Kerangka Konsep

#### a. Konsep Liberalisasi Pertanian

Dalam proses globalisasi dan liberalisasi yang terjadi pada perdagangan internasional banyak meliputi berbagai macam aspek dan sektor, tidak terkecuali terhadap sektor pertanian. Liberalisasi yang terjadi di bidang pertanian ditunjukkan melalui beberapa perjanjian yang memiliki tujuan untuk mengatur proses perdagangan hasil – hasil pertanian antar negara dan persetujuan awal ini sebenarnya timbul akibat adanya perbedaan kondisi awal pembangunan pada sektor pertanian yang terjadi antara negara maju dan berkembang (Hadiwigeno, 1999).

Salah satu bentuk dari adanya liberalisasi pertanian ialah perjanjian pertanian atau *Agreement of Agriculture* atau persetujuan di bidang pertanian yang berlaku sejak 1 Januari 1995 adalah suatu pakta dengan tujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan dibidang pertanian dan dalam rangka menciptakan sistem perdagangan pertanian yang adil serta berorientasi pasar. Program reformasi ini berisi kesepakatan – kesepakatan spesifik untuk mengurangi subsidi ekspor, impor dan peningkatan akses pasar melalui dibuatnya peraturan dan disiplin GATT (Rezlan Ishar Jenie, 2008).

Pada dasarnya, AoA berisi mengenai tiga unsur utama yaitu (Hira, 2005) :

#### a. Pengurangan subsidi ekspor

Negara – negara maju harus mengurangi subsidi ekspornya sebanyak 21% dari kapasitas ekspor dan 36% dari nilai subsidi per produk kepada para petani mereka. Sedangkan bagi negara berkembang harus mengurangi subsidi ekspor 14% dari kapasitas ekspor dan 24% dari nilai subsidi per produk.

b. Pengurangan dukungan (subsidi) dalam negeri

Negara – negara anggota WTO harus menurunkan subsidi dalam negeri mereka, dalam bentuk *Agreement Measure of Support (AMS)*, yaitu sebanyak 20% untuk negara maju dan 13.3% untuk negara berkembang. AoA memberikan pembeda untuk berbagai jenis subsidi dengan istilah “kotak” (*Red Box, Amber Box, Green Box dan Blue Box*).

c. Akses pasar

Dalam hal ini setiap negara harus menjamin tersedia akses pasar untuk hasil pertanian melalui pengurangan tarif serta perubahan gangguan bukan tarif menjadi tarif. Semua tarif (yang termasuk hasil perubahan gangguan bukan tarif) harus dikurangi sebanyak 36% bagi negara maju dan 24% bagi negara berkembang. Selain itu negara anggota harus memberikan akses pasar mulai dari 3% dari jumlah konsumsi dalam negeri dan mencapai 5% pada akhir berlakunya AoA.

Selain dari perjanjian AoA adapula perjanjian yang membawa beberapa perubahan mendasar di sektor pertanian, ialah mengenai persetujuan tentang hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan (TRIPS) (Khudori, 2004). Dalam TRIPS ini mengatur mengenai hak paten dimana dalam hal ini merupakan paten terhadap benih yang juga merupakan salah satu aspek dari bentuk liberalisasi pertanian. Dengan adanya permasalahan paten maka menimbulkan permasalahan mengenai hak penggunaan benih oleh para petani yang sebagaimana penggunaan benih sudah diatur dalam perjanjian – perjanjian WTO – AoA.

Salah satu kebijakan AoA mengenai hak paten benih pernah berdampak pada kelangsungan petani kanola di Kanada. Percy dan istrinya sudah 50 tahun menanam kanola di

Saskatchewan, bagian barat Kanada. Seperti para petani lainnya Percy mengumpulkan, menyimpan, memilih benih – benih kanola sendiri untuk kemudian ditanam kembali pada musim tanam selanjutnya. Tetapi, pada tahun 1998, Percy dan istrinya dituduh menggunakan secara ilegal benih kanola hasil rekayasa genetik produk Monsanto, Percy diancam harus membayar denda US\$ 15 per are tanaman kanolanya atau dituntut ke pengadilan. Percy bersikeras tidak menggunakan benih kanola dari Monsanto karena itu ia memilih jalur pengadilan dimana Monsanto menuntutnya membayar denda US\$ 200.000. Sayangnya ia kalah di pengadilan federal, dengan dukungan moral yang luas dari kelompok petani dan ORNOP, ia naik banding. Pada bulan Mei 2004, Mahkamah Agung Kanada memutuskan bahwa Percy melakukan pelanggaran hak paten Monsanto atas kanola RR karena tanaman tersebut ditemukan diladangnya. Tetapi Percy tidak membayar denda karena ia tidak mendapatkan keuntungan berlebihan akibat adanya kanola tersebut di ladangnya (Hira, 2005).

Ada juga kasus penggunaan paten benih di India, perusahaan Texas Rice Inc mendapatkan paten di AS untuk varietas beras Basmati. Beras basmati merupakan beras dengan kualitas terbaik dan paling dicari diantara beras – beras wangi lainnya, asalnya dari utara India dan Pakistan bukan dari Texas. Bahkan jika beras yang dipatenkan merupakan varietas baru yang diproduksi oleh rice tec, varietas itu diperoleh berkat penggunaan 22 garis keturunan benih yang ditanam dan diperbaiki oleh para petani dari generasi ke generasi. Paten mencakup semua varietas yang diturunkan dari garis keturunan yang ditanam di barat dan perusahaan itu tidak hanya membajak benih – benih itu namun mereka juga memakai nama “Basmati” yang merupakan nama dari Asia Selatan. Pemberian paten pada rice tec berarti penyerahan hak – hak monopoli atas sebuah produk turunan dari pengetahuan tradisional India dan Pakistan kepada sebuah perusahaan asing. Lebih lanjut, ia mencuri pasar penting para petani Asia karena “Basmati made in USA” sejak saat itu menyaingi ekspor mereka (Delforge, 2005).

Dampak diatas merupakan bukti bahwa benih bukan lagi milik bersama, petani tidak bisa lagi bebas menanam, menyimpan dan memuliakan benih – benih mereka sendiri. Apabila terbukti ada benih milik perusahaan di ladang mereka, para petani dapat dituntut di pengadilan. Dampak dari adanya kasus ini banyak terjadi sehingga berakhir dengan kebangkrutan pada petani kecil. Walaupun memiliki banyak pro dan kontra kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh WTO akan menjadi sesuatu yang mutlak bagi seluruh anggota WTO.

b. Teori Ketergantungan (Dependensia)

Teori dependensia atau teori ketergantungan muncul setelah kelompok yang memfokuskan penelitiannya pada hubungan yang terjadi antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Berangkat dari konsep Lenin mengenai imperialisme, kelompok ini beranggapan bahwa imperialisme masih tetap ada namun dengan karakter lain yaitu penguasaan ekonomi dari negara – negara kaya pada negara – negara kurang maju (*underdeveloped*). Negara – negara maju mungkin sudah meninggalkan tanah jajahannya namun tidak dalam hal ekonominya yang masih mereka kendalikan dan pembangunan yang dilakukan oleh negara dunia ketiga tidak terlepas dari keterkaitannya dengan negara – negara maju, karena (1) Negara mantan jajahan dapat memberikan sumber daya manusia serta alamnya dan investasi yang dilakukan oleh negara – negara maju akan diuntungkan karena negara – negara kurang maju dapat memberikan upah yang kecil untuk tenaga kerjanya serta murah sewa tanah dan bahan bakupun menjadi salah satu pendukungnya, (2) Negara – negara kurang maju dapat dijadikan sebagai pasar untuk produk – produk negara maju. Sedangkan untuk ekspor produksi, negara kurang maju seringkali telah ditentukan oleh negara maju. Eksploitasi yang terjadi ini menyebabkan kemiskinan di negara – negara kurang maju karena adanya pengaruh dari strategi ekonomi dan politik dari negara maju sehingga kemiskinan yang terjadi menjadi cerminan dari adanya ketergantungan ini (Miriam, 2008).

Menurut Dos Santos yang memberikan pendapat lain mengenai teori ketergantungan dan memberikan tiga bentuk ketergantungan, yakni (Arief, 1996) :

- I. Ketergantungan Kolonial. Ketergantungan yang terjadi dari dominasi politik dalam bentuk kekuasaan kolonial atau penjajahan, dari negara pusat yang menguasai negara pinggiran. Dalam kegiatan ekonomi utamanya mengenai perdagangan ekspor yang dilakukan negara penjajah dengan mengambil hasil bumi yang dibutuhkan oleh negaranya. Para penjajah ini melakukan monopoli tanah, pertambangan dan ternaga kerja yang bersifat mengeksploitasi negara jajahannya.
- II. Ketergantungan finansial – industrial. Ketergantungan ini tidak terdapat dominasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggiran secara diplomatis merdeka namun secara kenyatannya mereka masih dikuasi oleh negara – negara pusat melalui kekuatan finansial dan industrial dari negara pusat. Negara – negara pinggiran ini masih tetap mengirimkan bahan mentah untuk kehidupan industrinya serta negara – negara pusat menanamkan modalnya baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan para pengusaha lokal untuk bahan baku ini.
- III. Ketergantungan teknologis – industrial. Ketergantungan ini merupakan bentuk baru dari ketergantungan dimana negara pinggiran dapat melakukan ekspor bahan mentah untuk keperluan industri negara pusat. Perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya dalam kegiatan industri diarahkan pada pasar dalam negeri dari negara pinggiran. Walaupun industri ini terdapat di negara pinggiran bahkan kadang dimiliki oleh perusahaan lokal tapi untuk teknologi masih tetap ada di tangan perusahaan multinasional dan seringkali barang – barang produksi seperti mesin industri tidak ada yang dijual sebagai komoditi namun disewakan melalui perjanjian.

Dalam sektor pertanian menurut Prebisch yang mengarah pada nilai tukar dari komoditas pertanian terhadap komoditas barang industri dimana untuk barang industri yang semakin mahal dibandingkan dengan bahan – bahan pertanian. Terjadinya perbedaan nilai ini mengakibatkan terjadinya deficit pada neraca perdagangan di negara – negara pertanian apabila mereka berdagang dengan negara – negara industri maka defisit yang terjadi akan semakin besar. Prebich pun mengajurkan agar negara – negara pertanian melaksanakan industrialisasi demi mengatasi ketertinggalannya, dan dimulai dari industri substitusi impor (Arief, 1996).

Dalam ketergantungan tanda – tanda ini dapat dijelaskan, pertama permintaan untuk produk pertanian tidak fleksibel yang mengakibatkan anggaran negara pertanian yang digunakan untuk melakukan impor barang – barang industri dari negara pusat semakin meningkat, sedangkan pendapatan dari hasil ekspornya bersifat tetap dan menimbulkan deficit pada neraca perdagangannya. Kedua, terjadinya proteksi terhadap hasil pertaniannya sendiri yang dilakukan oleh negara industri mengakibatkan kesulitan untuk negara pertanian dalam melakukan kegiatan ekspor kesana dan memperkecil jumlah ekspor negara pinggiran ke negara pusat. Ketiga, kebutuhan dari bahan mentah yang digunakan dapat dikurangi akibat dari penemuan – penemuan teknologi baru yang dapat membuat bahan – bahan mentah sintetis sehingga ini memperkecil jumlah ekspor yang dilakukan oleh negara pinggiran ke negara pusat (Boxborough dikutip dari Arief 1996).

Akibat adanya ketergantungan terhadap luar negeri menghasilkan keputusan untuk menerapkan teknologi dibidang produksi yang tidak mengarah pada terciptanya kesempatan kerja. Sedangkan dalam sektor pertanian yang memiliki banyak tenaga kerja akibat kurangnya penyerapan pada masa sebelumnya dan akan semakin bertambah dibandingkan dengan bertambahnya angkatan kerja pada sektor ini setiap tahunnya. Dengan adanya teknologi produksi didalam program pembangunan pertanian yang dapat menaikkan hasil pertanian

khususnya beras, namun disaat bersamaan terjadi pengalihan surplus ekonomi terhadap perusahaan mesin dan alat – alat pertanian di negara maju dan perusahaan pupuk kimia pestisida dalam maupun luar negeri, importir alat dan mesin pertanian, importir pupuk dan pestisida kimia, serta distributor mesin – mesin, alat – alat pertanian dan pupuk kimia dan pestisida. Keuntungan yang dari surplus ekonomipun diperoleh oleh beberapa golongan saja yang ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan kegiatan produksi ini yang merugikan disektor pertanian tradisional (Sasono, 1980).

Terjadinya perbedaan hasil antara negara – negara pusat yang semakin kaya akibat semakin meningkatnya pendapatan yang didapatkan dari hasil ekspornya, berbanding terbalik dengan keadaan di negara -negara pinggiran yang membutuhkan uang untuk mengimpor barang – barang industri sementara pendapatan hasil dari mengekspor produk pertanian relatif tetap. Mengakibatkan terjadinya defisit pada neraca perdagangan internasional yang memberikan dampak lain yaitu kemiskinan yang hadir di negara – negara pinggiran. Terjadinya monopoli teknologi dari negara pusat yang memberikan sewa apabila ingin meminjam teknologi tersebut, proses industrialisasi di negara pinggiranpun menjadi semakin mahal hanya untuk ongkos dikarenakan harus membayar berbagai macam uang sewa. Ini dapat dikatakan keuntungan yang diciptakan oleh negara pinggiran pada akhirnya hanya akan kembali ke negara pusat.

Selain mengenai defisit terhadap negara – negara berkembang dapat dilihat juga akan adanya ketergantungan terhadap pangan di dunia, maka dalam hal produksi dan pemindahan makanan tersebut sangat memerlukan energi dan pengawetan. Dapat dibayangkan banyaknya energi yang dihabiskan hanya untuk mengirimkan kacang kedelai dari AS ke Surabaya Jawa Timur dan kita bandingkan dengan kedelai yang dikirimkan dari Kediri Jawa Timur. Serupa dengan apel yang diimpor dari AS yang merupakan hasil panen di bulan September, maka dibutuhkan pengawetan yang dilakukan secara kimiawi untuk dapat bertahan apabila akan

dipasarkan di bulan Januari dan bulan – bulan selanjutnya untuk sampai di Surabaya, berbeda dengan apel produksi dari Malang Jawa Timur yang tidak memerlukan pengawetan (Saragih, 2015).

Bahwa dalam teori ini ketergantungan sangat terasa untuk negara pinggiran yang menggantungkan kehidupannya terhadap negara pusat dan terjadinya ketimpangan akan negara pusat dan negara pinggiran. Dalam sector pertanian khususnya di Sumatera Selatan adanya ketergantungan bahan produksi membuat para petani harus membeli produk – produk dari perusahaan agribisnis demi hasil panen yang baik dan tidak merugikan petani apabila pada saat masa panen tiba tidak terjadi keterlambatan akibat hasil dari bibit yang tidak bagus atau hasil panen yang gagal akibat dimakan hama. Ketergantungan yang terjadi ini membuat para petani selalu menggunakan bahan produksi dari perusahaan – perusahaan agribisnis.

#### c. Teori Gerakan Sosial

Pada teori ketergantungan karena terjadinya suatu ketergantungan pada negara satu dengan lainnya dapat memberikan dampak yang sangat berpengaruh pada sebuah kondisi dinegara yang bergantung dengan negara yang satunya. Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa pada sektor pertanian, terjadinya liberalisasi pertanian yang dapat menimbulkan ketergantungan yang terjadi antara para petani dan perusahaan multinasional menimbulkan keresahan dan kerugian kepada para petani serta dengan adanya perjanjian mengenai pertanian membuat kondisi para petani menjadi lebih buruk lagi. Timbulnya permasalahan serta keresahan para petani membuat munculnya suatu gerakan sosial akibat adanya ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Teori gerakan sosial menurut Charles Tilly merupakan suatu gerakan yang dilakukan secara berangsur – angsur, demonstrasi dan aksi yang dilakukan oleh orang biasa yang dapat membuat tuntutan secara kolektif kepada yang lain. Secara lebih jauh Charles Tilly

mengungkapkan bahwa kita harus memiliki persiapan sebagai perangkat lunak untuk berpartisipasi di tempat umum seperti dengan kesamaan minat, organisasi, kesempatan, mobilisasi, dan tindakan kolektif (Tilly Charles, 1978).

Dalam mewujudkan tindakan dari teorinya, Tilly menjelaskan lebih jauh mengenai persiapan yang harus dimiliki dalam kegiatan gerakan sosial ini, seperti minat, organisasi, kesempatan, mobilisasi, dan tindakan kolektif (Tilly Charles, 1978). Dari penjelasan tindakan kegiatan diatas dapat diartikan bahwa :

- a. Minat dalam konteks ini bahwa memiliki cita – cita dan tujuan perjuangan yang sama.
- b. Organisasi sebagai media untuk aspirasi dalam meneriam semua persoalan petani.
- c. Mobilisasi dapat dikatakan sebagai kekuatan dalam melaksanakan suatu gerakan.
- d. Tindakan kolektif ialah sebuah tindakan yang berbentuk advoksi dan pertunjukan yang dapat diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk aksi
- e. Kesempatan dalam mendapatkan momen – momen serta isu yang sedang dihadapi oleh organisasi petani.

Menurut Donatella Della Porta dan Mario Diani gerakan sosial dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni organisasi gerakan sosial profesional dan organisasi gerakan sosial partisipatif. Organisasi gerakan sosial professional adalah organisasi yang tidak tergabung dari masyarakat yang menjadi korban dan golongan ini mempunyai unsur professional, karena memiliki struktur yang formal dan sistem manajemen yang mempunyai keahlian dalam hal teknis dalam keperluan gerakan dan ciri – ciri ini terlekat pada LSM. Sedangkan gerakan sosial partisipatif dibagi kembali menjadi dua yaitu organisasi protes massa yang merupakan penggabungan perhatian pada demokrasi partisipatif dengan tingkat formalisasi tertentu dari struktur organisasi dan kelompok akar sedangkan untuk kelompok akar rumput sendiri yang menggabungkan orientasi partisipatif yang besar dengan tingkat struktur formal yang kecil dan

keberadaan organisasi ini tergantung pada kemauan anggota untuk bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan mereka.

Dalam gerakan sosial terdapat advokasi yang merupakan sebuah usaha untuk mempengaruhi suatu kebijakan untuk lebih berpihak terhadap kepentingan publik dengan menyampaikan pesan – pesan yang didasari oleh argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan, didalam advokasi terdapat komponen seperti kampanye dan aksi. Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberi informasi terkait isu – isu serta masalah yang dihadapi beserta dampak yang akan diterima oleh masyarakat serta untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan aksi merupakan salah satu kekuatan utama dalam gerakan sosial seperti memotivasi dan mendukung untuk lahirnya gerakan organisasi rakyat lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan gerakan sosial (SPI) serta dapat menjalin hubungan yang setara dengan lembaga dan aparatur negara yang bersifat kritis baik dalam maupun luar negeri sepanjang tidak berlawanan dengan pandangan, tujuan dan kepentingan.

Selain melakukan advokasi gerakan sosial juga melakukan pemberdayaan yang merupakan suatu proses pribadi dan sosial serta pembebasan keahlian, kreativitas, kebebasan berespresi dan kompetensi. Pemberdayaan organisasi merupakan suatu proses dalam membangun masyarakat yang dapat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna dapat memperbaiki situasu dan keadaan diri sendiri (Sumaryadi, 2005)dalam proses pemberdayaan organisasi ini memiliki dua kecenderungan, yakni: Kecenderungan primer dimana proses pemberdayaan ini ditekankan pada proses memberi atau mengalihkan sebagian keahlian, kekuatan dan keleluasan kepada masyarakat supaya dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya. Berbeda dengan kecendrungan sekunder yang lebih menekankan pada proses mendorong, stimulasi atau memotivasi masyarakat agar lebih mandiri untuk menentukan apa yang mereka inginkan melalui proses dialog.

Dalam pemberdayaanpun terdapat dua komponen yaitu pendidikan dan pelatihan. pendidikan merupakan proses dalam mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi – informasi yang berguna untuk anggota organisasi serta memberikan pengetahuan mengenai isu – isu serta permasalahan dan bagaimana cara menghadapinya. Pelatihan memberikan bentuk kegiatan pelatihan untuk para anggota khususnya di daerah – daerah dalam menghadapi isu – isu serta permasalahan yang ada.

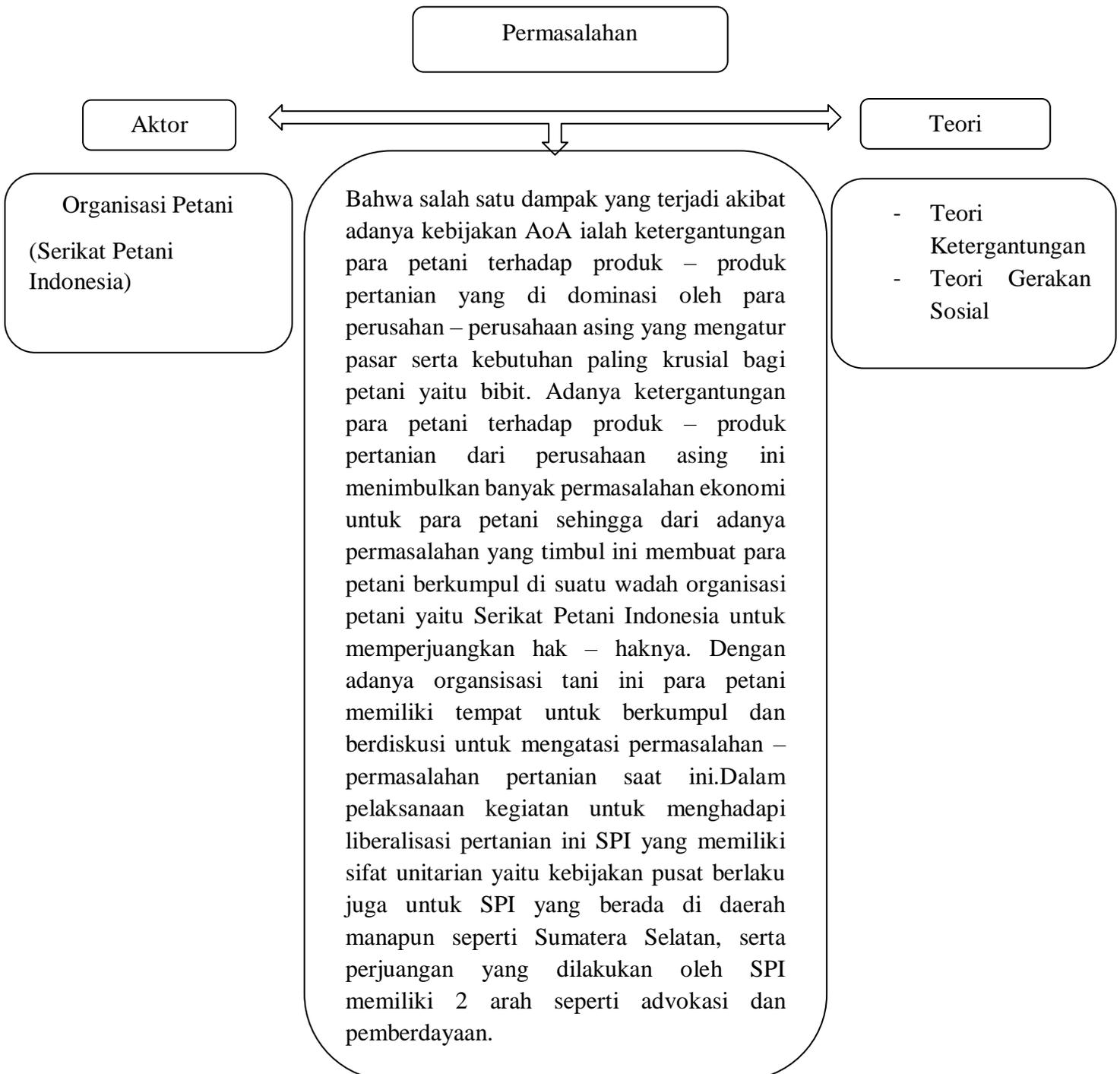
Pemberdayaan organisasi ini memiliki tujuan untuk melatih individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri, bentuk kemandiriannya sendiri dapat berupa kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam mengambil tindakan dan keputusan yang akan dilakukan. Serta pemberdayaan ini bertujuan untuk memajukan tara hidup masyarakat dan memberi kesadaran mengenai kebebasan bagi setiap orang. Memiliki orientasi pada komunitas yang tidak berdaya, namun dalam pemberdayaan bisa dilakukan untuk komunitas yang sudah berdaya. Upaya pemberdayaan komunitas Diperlukan pemberdayaan komunitas untuk memaksimalkan peran komunitas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tiga upaya, yaitu: 1. Membangun kembali struktur serta lembaga yang dapat memberikan akses yang sama mengenai sumber daya, pelayanan, dan partisipasi masyarakat, 2. Berupaya membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mendorong kesadaran masyarakat terkait isu – isu sosial, dan 3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas hidup para anggotanya.

Bahwa pada prakteknya gerakan sosial tidak hanya dalam bentuk advokasi namun juga dalam bentuk pemberdayaan dimana para anggota organisasi tersebut mendapatkan pendidikan dan juga pelatihan untuk dirinya sendiri atau komunitas di daerah tersebut. Dalam hal ini SPI melakukan advokasi dan pemberdayaan untuk daerah sumatera selatan agar para petani dapat mengetahui masalah – masalah yang terjadi dan juga mendapatkan pemberdayaan untuk dapat

mandiri dan tidak tergantung pada perusahaan – perusahaan dalam hal mengenai bibit dan pestisida.

### 1.7.2 Alur Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat ditarik bagaimana alur pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :



## 1.8 Argumen Utama

Bersumber pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, peneliti memiliki argumen untuk saat ini bahwa salah satu dampak yang terjadi akibat adanya kebijakan AoA ialah terjadinya ketergantungan para petani terhadap produk – produk pertanian yang di dominasi oleh para perusahaan – perusahaan asing yang mengatur pasar serta kebutuhan paling krusial bagi petani yaitu bibit, pestisida dan pupuk. Adanya ketergantungan para petani terhadap produk – produk pertanian ini menimbulkan banyak permasalahan ekonomi untuk para petani, sehingga dari adanya permasalahan yang timbul ini membuat para petani berkumpul di suatu wadah organisasi petani yaitu Serikat Petani Indonesia untuk memperjuangkan hak – haknya. Dengan adanya organisasi tani ini para petani memiliki tempat untuk berkumpul dan berdiskusi untuk mengatasi permasalahan – permasalahan pertanian saat ini. Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghadapi liberalisasi pertanian ini SPI yang memiliki sifat unitarian yaitu kebijakan pusat berlaku juga untuk SPI yang berada di daerah seperti Sumatera Selatan, serta perjuangan yang dilakukan oleh SPI memiliki 2 arah seperti advokasi dan pemberdayaan. Bentuk perjuangan yang dilakukan SPI akan mendorong kesadaran bagi para petani untuk berusaha terlepas dari ketergantungan serta berdaulat secara pangan dan dapat melakukan reforma agraria untuk kesejahteraan para petani tradisional.

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian Kualitatif yang berjenis Deskriptif. Menurut Liz Spencer, penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif dan sejarah orang dalam konteks dan sering ditandai dengan concern untuk menemukan perspektif aktor, metode konteks – sensitif dan semi – terstruktur, kaya dan data, penjelasan di tingkat makna serta

bagaimana dan mengapa pertanyaan diajukan (Umar, 2017). Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang menggambarkan kenyataan yang penulis teliti. Metode deskriptif memusatkan penelitian pada masalah-masalah atau fenomena- fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang di selidiki serta diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat. Penelitian ini menjelaskan keadaan dari objek penelitian dan mencoba menganalisis untuk memberitahu kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

### 1.9.2 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan pernyataan yang mengartikan atau memberi makna suatu konsep atau istilah tertentu. Definisi konseptual merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dari konsep atau istilah tersebut, bersifat konstitutif (merupakan definisi yang disepakati oleh banyak pihak dan telah dibakukan di kamus bahasa), formal dan mempunyai pengertian yang abstrak.

Definisi konsep dalam penelitian ini ialah :

Liberalisasi Pertanian merupakan Liberalisasi di bidang pertanian ditunjukkan dengan adanya berbagai macam perjanjian yang bertujuan mengatur proses perdagangan hasil-hasil pertanian antar negara. Persetujuan ini sebenarnya timbul sebagai akibat perbedaan kondisi awal pembangunan sektor pertanian antara negara maju dan negara berkembang (Hadiwigeno, 1999).

### 1.9.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia – sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Maka fokus penelitian yang akan digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

Variable	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam Menghadapi Liberalisasi Pertanian di Sumatera Selatan (Tilly Charles, 1978)	Advokasi	Kampanye	Memberikan sosialisasi mengenai permasalahan petani serta dampaknya kepada masyarakat umum untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat luas mengenai petani.
		Aksi	Aksi Massa sebagai salah satu kekuatan utama SPI, Mendorong dan mendukung lahirnya organisasi rakyat lainnya yang sejalan dengan SPI serta menjalin hubungan setara dengan lembaga dan aparatur negara yang bersifat kritis baik didalam maupun diluar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan pandangan, asas, tujuan dan kepentingan SPI.
	Pemberdayaan	Pendidikan	Mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berbagai informasi yang berguna bagi

			petani dan anggota SPI serta Memberikan pengetahuan mengenai isu – isu pertanian dan bagaimana cara menghadapinya
		Pelatihan	Memberikan kegiatan pelatihan untuk para petani khususnya di daerah dalam menghadapi isu – isu pertanian.

Sumber : diolah oleh penulis

#### 1.9.4 Unit Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem sebagai unit analisis dalam penelitian ini. gerakan sosial termasuk kedalam sistem sehingga peneliti ingin melihat bagaimana gerakan sosial (SPI) dapat menghadapi liberalisasi pertanian yang terjadi di Sumatera Selatan. Serta dalam penelitian ini yang menjadi objek analisisnya adalah Ogan Komering Ilir di desa Bangsal dan Banyuasin di Kelurahan Talang Keramat.

#### 1.9.5 Jenis dan Sumber data

Jenis yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan sumber data Primer dan Sekunder.

- a. Data Primer merupakan data yang didapatkan dan dikumpulkan dari catatan hasil wawancara dan juga dalam penelitian ini dilakukan observasi dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari literature, surat kabar, jurnal yang sesuai dengan penelitian,

data yang diperoleh dari internet serta menjadi pendukung dari untuk informasi yang didapatkan dari data primer

#### 1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti akan meliputi beberapa hal seperti :

##### a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui persepsi dan opini tentang objek penelitian yang dilakukan secara langsung dari kata-kata dan tindakan dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak yang terkait.

##### b. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan – bahan tertulis yang sesuai dengan kebutuhan penelitian seperti buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, laporan, media cetak maupun internet.

#### 1.9.7 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para tokoh – tokoh anggota SPI Sumsel yang ada di Ogan Komering Ilir di desa Bangsal dan Banyuasin di Kelurahan Talang Keramat serta SPI Sumsel.

#### 1.9.8 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Setelah peneliti mendapatkan data, baik itu berupa data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi,

maka selanjutnya peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan data observasi yang didapatkan dengan wawancara pada informan.

#### 1.9.9 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis adalah berdasarkan dari Huberman dan Miles yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

##### a. Reduksi Data

Dengan banyak data yang diperoleh data di lapangan maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berate merangkum, memilih hal-hal yang menjadi pokok menfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

##### b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menampilkan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi dan apa yang telah dipahami.

##### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara. Dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Data yang sudah ada dianalisis dengan menggunakan kata-kata dan kalimat untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan penelitian.

#### 1.9.10 Jadwal Penelitian

**Tabel 1.3**

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
Persiapan							
Pengajuan Judul	X						
Persiapan Judul	X						
Persetujuan Bimbingan	X						
Pelaksanaan							
Bimbingan Bab 1		X	X	X			
Seminar Proposal				X			
Revisi Proposal				X			
Pengumpulan Data				X	X		
Pengolahan Data							
Bimbingan Bab 2					X		
Bimbingan Bab 3					X		
Bimbingan Bab 4					X	X	
Sidang							
Pendaftaran						X	
Penyerahan Draft Skripsi						X	
Persiapan Sidang						X	

Sidang Skripsi							X
----------------	--	--	--	--	--	--	---

Sumber : diolah oleh penulis

#### 1.9.11 Sistematika Penulisan

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II GAMBARAN UMUM

Bab dua ini akan menguraikan gambaran umum mengenai aspek – aspek yang menjadi penelitian skripsi ini.

##### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab tiga akan menjelaskan mengenai pembahasan serta hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh SPI di Sumatera Selatan seperti pemberdayaan dan pendidikan untuk dapat menghadapi liberalisasi pertanian di Sumatera Selatan.

##### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab empat merupakan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang ditujukan sebagai bahsan perbaikan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

#### Daftar Pustaka

## Daftar Pustaka

- A.N, A. (2020, Juli 15). *Kementan: Lahan Pertanian di Sumsel Belum Diolah Maksimal*. Retrieved from Republika : <https://www.republika.co.id/berita/nasional/d aerah/18/09/13/pezbqg384-kementan-lahanpertanian-di-sumsel-belum-diolah-maksimal>.
- Agazzi, s. (2012, maret 12). *U.N. Human Rights Council Exhorted to Defend Peasants' Rights*. Retrieved from La Via Campesina : <https://viacampesina.org/en/un-human-rights-council-exhorted-to-defend-peasants-rights/>
- Andi Amran Sulaiman, K. S. (2018). *Kebijakan Penyelamat Swasembada Pangan* . Jakarta: IAARD PRESS.
- Antara. (2020, Juli 15). *Mentan: Sumsel Lumbung Pangan Nasional di 2021* . Retrieved from Medcom: <https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/VN xZ0vyk-mentan-sumsel-lambung-pangannasional-di-2021>
- Antara, M. (2000). *Orientasi Penelitian Pertanian: Memenuhi Kebutuhan Pangan Dalam Era Globalisasi*. Bali.
- Arief, B. (1996). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama .
- Baharuddin, A. (2015). Resistensi Koalisi Organisasi Non-Pemerintah untuk Keamanan Pangan dan Hayati terhadap Program Penanaman Benih Transgenik Monsanto di Indonesia. *Jurnal Wanua Jurusan HI Universitas Hasanuddin Vol. 1, No. 1*.
- BengkuluToday. (2020, Oktober 22). *BengkuluToday.com*. Retrieved from <https://www.bengkulutoday.com/reforma-agraria-solusi-bagi-masalah-pertanian-indonesia-dan-pengakuan-hak-petani.com>
- BPS. (2019). *AnalisisLV Komoditas Ekspor, 2012-2018 : Sektor Pertanian, Industri dan Pertambangan* . Jakarta: BPS RI.
- Delforge, I. (2005). *Dusta Industri Pangan : Penelusuran Jejak Monsanto* . Yogyakarta: InsistPress.
- Desmarais, A. A. (2013, mei 18). *Serikat Petani Indonesia* . Retrieved from <https://spi.or.id/ringkasan-sejarah-la-via-campesina/>
- Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, K. P. (2020, Juli 27). *KTM KE-7 WTO: Indonesia Serukan Diselesaikannya Putaran Doha Development Agenda pada*

- Tahun* 2010. Retrieved from [http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news\\_detail&news\\_category\\_id=1&news\\_sub\\_category\\_id=0&news\\_content\\_id=716&alldate=true](http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_category_id=1&news_sub_category_id=0&news_content_id=716&alldate=true)
- Fauzi, N. (1999). *Petani Dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gatra. (2020, Oktober 23). *Gatra.com*. Retrieved from <https://www.gatra.com/detail/news/352848-Petani-Sumsel-Gelar-Aksi-Pertanyakan-Reforma-Agraria.com>
- Gatot Irianto, Liberalisasi VS Kedaulatan Pangan, Kompas, 10 Maret 2016
- Hadiwigeno, S. (1999). Globalisasi, Liberalisasi dan Daya Saing Sektor Pertanian. *JEPVOLA NO.2*, 135 - 136.
- Halimatus, Sa'diyah dan Melisa, Riska, Putri. (2017, Oktober 20). Republika.
- Hariyono, T. (2016 , Februari 12). *Agroekologi Untuk Kesejahteraan Petani*. Retrieved from Serikat Petani Indonesia: <https://spi.or.id/agroekologi-untuk-kesejahteraan-petani/>
- Hariyono, T. (2020, Oktober 23). *Serikat Petani Indonesia*. Retrieved from <https://spi.or.id/agroekologi-untuk-kesejahteraan-petani/.com>
- Hasil Sidang Wto Ke 9 Di Bali & Peran Gaeki*. (2020, Juli 27). Retrieved from Indonesia Coffee Exporters Association: <http://gaeki.or.id/en/hasil-sidang-wto-ke-9- di-bali-peran-gaeki/>
- Hira, J. (2005). *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Izudin, A. (2017). *Gerakan Sosial Petani : Pola, Strategi dan Tantangan di Tengah Modernitas*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Jupri. (2020, Juni 20). SPI dalam menghadapi liberalisasi pertanian di Sumatera Selatan. (A. Lesari, Interviewer)
- Jupri. (2020, Juni 20). SPI Dalam Menghadapi Liberalisasi Pertanian di Sumatera Selatan. (A. Lestari, Interviewer)
- Khudori. (2004). *Neoliberalisme Menumpas Petani : Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*. Yogyakarta : Resist Book.

- Kompas. (2020, 01 Jumat). *Jokowi Isyaratkan Tak Lanjutkan Program MP3EI dalam Pemerintahannya*. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/05/17485041/Jokowi.Isyaratkan.Tak.Lanjutkan.Program.MP3EI.dalam.Pemerintahannya>
- Kompas. (2020, Februari 25). Varietas Padi Lokal Sumsel Tidak Diminati. Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
- Mann, A. (2008). Spaces or Talk: Information and Communication Technologies (ICTs) and Genuine Dialogue in an International Advocacy Movement. *Asian Social Science Vol 4, No 10*.
- Maria Hartiningsih dan Brigita Isworo Laksmi, Vandana Shiva : Benih adalah esensi, Kompas, 12 Oktober 2014
- Miriam, P. B. (2008). *Dasar - dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mochamad Slamet Hidayat & Asianto Sinambela, e. a. (2006). *Sekilas WTO (World Trade Organization), Edisi Keempat*. Jakarta : Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri.
- Mochamad Slamet Hidayat, e. (n.d.). *Sekilas WTO (World Trade Organization), Edisi Keempat*. Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri.
- Mohtar, M. (1989). *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Organization, W. T. (2020, Juli 27). *Ministerial Statement: Adopted on 14 September 2003*. Retrieved from Ministerial Statement: Adopted on 14 September 2003, Ministerial Conference Fifth Session, Cancún, 10 - 14 September 2003: [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/acc\\_e/cbt...e/annex3\\_e.doc](https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/cbt...e/annex3_e.doc)
- Purwanto, A. J. (2012). 1. Perjuangan kelompok tani internasional dalam melawan program liberalisasi pertanian global (Studi tentang perlawanan La Via Campesina terhadap program liberalisme pertanian WTO) . *Jurnal Ilmu Politik HI Vol.12, No.2*.
- Purwanto, H. (n.d.). Local To Global ; How Serikat Petani Indonesia Has Accelerated The Movement for Agrarian Reform. *La Via Campesina's Open Book: Celebrating 20 Years of Struggle and Hope*.

- Polong, J. (2020, Oktober 22). SPI dalam Menghadapi Liberalisasi Pertanian di Sumsel. (A. Lestari, Interviewer)
- Rachman, I. A. (2009). *Hegemoni Neo - Liberalisme terhadap Kedaulatan Pangan Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rezlan Ishar Jenie, A. S. (2008). *Persetujuan Bidang Pertanian (Agreement on Agriculture/AoA)*. Jakarta : Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI.
- Rohman, H. (2020, Juni 23). SPI dalam menghadapi liberalisasi pertanian di Sumatera Selatan. (A. Lestari, Interviewer)
- Saragih, D. H. (2015). PERJUANGAN PETANI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN PANGAN . *Seminar Nasional "Tinjauan Akademis, Konsepsi, dan Strategi Kedaulatan Pangan" yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor*. (p. 6). Bogor: Serikat Petani Indonesia.
- Sarwindaningrum, I. (2020, September 14). Baru Dua Kabupaten di Sumsel Lindungi Lahan Pertanian. Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia .
- Sawiit, M. H. (2007). *Liberalisasi Pangan: Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Selatan, B. P. (2019). *Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018* . Palembang: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- Setiawan, B. (2003). *Globalisasi Pertanian*. Jakarta: Indonesia for Global Justice.
- Setiawan, B. (2020, Juli 27). *Konferensi WTO ke-7*. Retrieved from Institute for Global Justice: [http://www.globaljust.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=390&Itemid=1](http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=1)
- Setyaka, V. (2019). Politik Masyarakat Sipil Internasional : Strategi Transgressing Via Campesina dalam Memperjuangkan Hak Asasi Petani. *Seri Working Paper : Kajian Teoritik Agraria dan Gerakan Sosial*.
- SPI. (2009). *Evaluasi Terhadap Kebijakan Pertanian Pemerintahan SBY - JK Tahun 2004 - 2009* :

*Kebijakan Neoliberal Gagal Membangun Pertanian dan Menyejahterakan Petani.*  
Jakarta: Serikat Petani Indonesia.

SPI. (2011). *Profil-PUSDIKLAT pertanian berkelanjutan SPI*. Jakarta: Serikat Petani Indonesia.

SPI. (2020, Agustus 8). *Serikat Petani Indonesia*. Retrieved from <https://spi.or.id/tentang-kami/organsasi/.com>

SPI. (2020, Agustus 8). *Serikat Petani Indonesia*. Retrieved from <https://spi.or.id/isu-utama/anti-neoliberalisme/.com>

SPI. (2020, Oktober 23). *Serikat Petani Indonesia*. Retrieved from <https://spi.or.id/puluhan-ribu-petani-spi-rayakan-haritani-2015-2/.com>

SPI. (2020, Oktober 23). *Serikat Petani Indonesia*. Retrieved from <https://spi.or.id/isu-utama/pertanian-agroekologis/pusdiklat-demplot/.com>

Sriwijaya., B. P. (2005). *Master Plan Lumbung Pangan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang

Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah otonom dan Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Tambun, L. T. (2020, 01 31). *Jokowi Siap Lanjutkan Program "Master Plan" Percepatan Pembangunan*. Retrieved from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/nasional/207702/jokowi-siap-lanjutkan-program-master-plan-percepatan-pembangunan>

Tilly Charles, f. m. (1978). *From Mobilization to Revolution*. New York: The University of Michigan.

Umar, B. S. (2017). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.

Wahono. (1999). Jurnal Wacana no IV. *Revolusi Hijau : Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi*.

WALHISumsel. (2020, September 16). Peringatan Hari Tani Nasional dan Hari Pangan se - Dunia. Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

Wijaya, T. (2020, September 16). *Lanskap Lestari, Cara Desa Bangsa Berdaulat Pangan dan Menjaga Bentang Alam*. Retrieved from Mongabay Indonesia:

<https://www.mongabay.co.id/2019/03/04/lanskap-lestari-cara-desa-bangsai-berdaulat-pangan-dan-menjaga-bentang-alam/>

WWF. (1998 ). Agriculture in Uruguay Round: implications for Sustainable Development in Developing Countries. *Third World Resurgence No. 100/101 Dec. 98/Jan 99, The WTO, Agriculture and Food Security.*